


## Islam dan Legitimasi Kekuasaan: Konstruksi Identitas Politik pada Kesultanan Awal Melayu

Choirun Niswah<sup>1\*</sup>, Amanda Agustin<sup>2</sup>, Wulan Sari<sup>3</sup>, Rahman Ruki<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang, Jl.Prof.K.H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Pahlawan, kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan

E-mail: [choirunniswah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:choirunniswah_uin@radenfatah.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3813>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 14 Nov 2025

Revised: 20 Nov 2025

Accepted: 27 Nov 2025

#### Kata Kunci:

Kecerdasan Emosional,  
Teknologi Interaktif,  
Pembelajaran Matematika,  
Pendampingan Guru,  
Wayground

#### Keywords:

Emotional Intelligence,  
Interactive Technology,  
Mathematics Learning,  
Teacher Mentoring,  
Wayground



### ABSTRACT

Kajian ini bertujuan menganalisis peran Islam dalam melegitimasi identitas politik dan kekuasaan di kerajaan-kerajaan Melayu awal seperti Samudera Pasai, Malaka, dan Demak. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan penelitian pustaka yang didasarkan pada data primer dan sekunder terkait politik Islam dan sejarah Melayu. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa Islam lebih dari sekadar sistem keagamaan; Islam juga memberikan legitimasi politik yang mendukung struktur sosial, hukum, dan pemerintahan di dunia Melayu. Legitimasi Islam didasarkan pada tiga pilar: teologis (Zillullah fil Ard), hukum normatif (syariah sebagai landasan hukum), dan sosiokultural (menggabungkan hukum Islam dengan adat istiadat setempat). Hasil kajian ini memperkuat pemahaman tentang politik Islam di Nusantara dan warisan kesultanan Melayu dalam menciptakan aliansi keagamaan-politik.

*This study aims to analyse the role of Islam in legitimising political identity and kekuasaan in early Melayu kingdoms such as Samudera Pasai, Malaka, and Demak. This study employs a kualitatif methodology with pustaka research that is based on primary and secondary data related to Islamic politics and Melayu history. The study's findings indicate that Islam is more than just a religious system; it also provides political legitimacy that supports social, legal, and governmental structures in the Melayu world. Islam's legitimacy is based on three pillars: theological (Zillullah fil Ard), normative-hukum (syariat as the foundation of law), and sociocultural (asimilating Islamic law with local customs). The results of this study enhance understanding of Islamic politics in Nusantara and the warisan of the Melayu kesultanan in creating a religious-political alliance.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Choirun Niswah, et al (2025). Islam dan Legitimasi Kekuasaan: Konstruksi Identitas Politik pada Kesultanan Awal Melayu, 4(2) 11495-11500. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3813>

### PENDAHULUAN

Pengaruh Islam terhadap sistem pentadbiran Melaka pada abad ke-15 terlihat dalam Hukum Kanun Melaka yang dikenal juga dengan Undang-Undang Melaka. Menurut Fathil dkk. (2023), terdapat beberapa permasalahan terkait sistem hukum Islam di Melaka yang meliputi masalah jual beli, sistem percukaaian, sistem mata uang, pinjaman, dan upahan. Masuknya Islam di Indonesia merupakan faktor penting yang membentuk identitas dan budaya Bangsa. Proses penyebaran Islam melibatkan jalur perdagangan membawa serta undang-undang baru yang mempengaruhi tatanan sosial dan pola pikir masyarakat (El et al., 2024). Mereka bergerak dalam bidang usaha penjualan komoditas yang dihasilkan dari daerah masing-masing lalu di pasar Pasai. Menurut Arifin dan Masykuroh (2023), kegiatan ini membantu Samudera Pasai menjadi pusat pelayaran, perdagangan, dan Islamisasi di Nusantara. Pendidikan Islam di Nusantara telah melahirkan “golongan Islam menengah”, yang terdiri dari para pedagang dan buruh di kota Pelabuhan (Hamid, 2025).

Kemunculan kesultanan-kesultanan Melayu, seperti Samudera Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam, menandai dimulainya transformasi signifikan dalam sejarah Nusantara. Transformasi ini lebih merupakan pergeseran ideologis dan identitas daripada pergeseran politik yang melibatkan konsolidasi kekuasaan. Islam telah memberikan legitimasi kepada setiap agama di dunia Melayu (Muhammad, 2021). Kemunculan Islam sebagai ideologi baru telah menjadi katalisator dalam proses pembentukan entitas politik yang legitimasinya tidak didasarkan pada konsep warisan Hindu-Buddha atau dewaraja, melainkan pada tatanan kosmologis baru. Legitimasi otoritas sultan selama periode formatif ini merupakan isu krusial yang mengharuskan terciptanya identitas politik yang persuasif dan meyakinkan. Naskah Sejarah Melayu, sebagaimana ditegaskan kembali oleh (Buyong Adil, 1981), menggambarkan bagaimana raja narasi dikonstruksi untuk menunjukkan keterkaitannya dengan tokoh-tokoh Islam guna meningkatkan otoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Islam digunakan sebagai alat utama untuk membangun dan memperkuat legitimasi politik dalam kesultanan-kesultanan awal Melayu. (Gallop, 2019) menjelaskan bahwa cap kerajaan dan stempel sultan seringkali menciptakan gelar-gelar Islam seperti "Zillullah fil Ard" yang menjunjung tinggi keyakinan bahwa bumi adalah bayangan Tuhan. Menurut Azra (2013), jaringan ulama yang terhubung dengan para ulama Timur Tengah sangat penting dalam membangun politik Islam di Melayu, termasuk dalam memberikan legitimasi keagamaan kepada masyarakat.

Rasional penelitian ini bermula dari kebutuhan untuk melanjutkan diskusi ilmiah tentang Islamisasi di Nusantara, yang saat ini berfokus pada perdebatan lama tentang asal-usul dan kronologi, sementara aspek politik dan ideologis dari topik ini masih dapat dikaji lebih mendalam. Menurut (Prof. Dr. Azyumardi Azra, 2013), jaringan ulama Nusantara dengan ulama Islam di Timur Tengah, khususnya Haramain, tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori politik dan konsep kepemimpinan. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya secara konsisten berfokus pada rentang usia antara 17 dan 18 tahun. Di sisi lain, periode pertama, yaitu usia 13 hingga 15 tahun, sebagai tahap perkembangan wacana, masih menyisakan ruang untuk diskusi lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi identitas politik pada periode paling krusial di mana legitimasi Islam bagi kemajuan umat manusia dapat ditegaskan.

Beberapa studi relevan telah menghasilkan temuan yang kuat. Misalnya, dalam membahas identitas Melayu, (Tree, 2010) menyoroti "keramat" dan kemampuan supranatural raja sebagai sumber legitimasi yang kemudian diislamkan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Oman Fathurahman, 2022) tentang naskah-naskah Aceh mengungkapkan bagaimana teks-teks keagamaan digunakan untuk meningkatkan otoritas sultan dalam Islam. Meskipun demikian, terdapat studi yang secara khusus membahas tiga elemen—Islam, legitimasi kekuasaan, dan konstruksi identitas politik—secara integratif pada tahap awal ini. Permasalahan dalam studi ini adalah bagaimana kesultanan-kesultanan Melayu awal membangun identitas politik mereka dengan menggunakan simbol, tradisi, dan institusi Islam untuk mendapatkan legitimasi di mata elit tradisional dan masyarakat umum. Hooker (1986) Penting untuk dicatat bahwa identitas Melayu tidak hanya terbentuk melalui bahasa dan budaya, tetapi juga melalui konstruksi kekuasaan yang didasarkan pada simbol-simbol keagamaan.

Sebagai alternatif solusi metodologis, penelitian ini akan mengadopsi kurikulum politik dan intelektual sebagai sumber utama, seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin). Teks-teks sastra sejarah ini bukan sekadar merekam peristiwa tetapi, yang lebih penting, sekadar representasi pandangan istana dalam menciptakan wacana yang sah. Dengan menganalisis struktur narasi, metafora, dan cerita dalam naskah-naskah tersebut, serta menganalisisnya menggunakan tema-tema arkeologi seperti batu nisan dan mata uang, penelitian ini bertujuan untuk memperluas strategi diskursif yang digunakan. Solusinya adalah membangun identitas politik melalui tiga lensa: pertama, penciptaan silsilah dan asal-usul mitos yang berkaitan dengan ajaran Islam dan Nabi Muhammad; kedua, penggunaan teks-teks Islam yang mendukung atau melemahkan teks-teks tradisional; dan ketiga, pembentukan lembaga-lembaga Islam seperti jabatan qadi dan syaikh al-Islam, yang berfungsi sebagai pilar struktural bagi sultan.

Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika politik dan ideologi selama fase formatif Melayu. Dengan menyoroti legitimasi Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi para sejarawan Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam memahami kendala lokal dan adaptasi terhadap cita-cita global. Pemanfaatan penelitian ini tidak terbatas pada kegiatan akademis; penelitian ini juga menawarkan

perspektif historis tentang hubungan antara agama dan bangsa dalam konteks masyarakat Melayu, yang masih sangat relevan hingga saat ini.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis historis. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan karakteristik objek penelitian, yaitu peristiwa dan fenomena historis, dengan penekanan pada pemahaman proses konstruksi identitas politik. Penelitian ini berjenis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkonstruksi dan menganalisis secara kritis bagaimana Islam digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan.

### ***Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dengan fokus utama pada naskah-naskah dan artefak dari kesultanan-kesultanan Melayu dari tahun 13 hingga 15, khususnya Kesultanan Samudera Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam. Secara geografis, Wilayah Kajian merupakan bagian dari Selat Malaka yang merupakan pusat politik dan intelektual Melayu-Islam pada masa itu.

### ***Sasaran penelitian/target***

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rekonstruksi historis yang komprehensif mengenai strategi dan mekanisme konstruksi identitas politik yang dilakukan oleh elit penguasa kesultanan awal Melayu. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi yang dibangun melalui integrasi simbol-simbol Islam dengan struktur kekuasaan tradisional.

### ***Subjek penelitian***

Topik penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, ringkasan teks, yang mencakup sastra sejarah (seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin)) dan undang-undang (seperti Undang-Undang Melaka). Sumber primer benda terdiri dari dua artefak penting, seperti batu nisan dari era Islam awal dan mata uang kuno yang dipersembahkan oleh masing-masing kesultanan. Pemilihan subjek secara purposif dilakukan menggunakan naskah atau kriteria artistik yang secara eksplisit menciptakan narasi tentang identitas, legitimasi, dan kekuasaan Islam.

### ***Prosedur penelitian***

Prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan sekuensial:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber): Tahap ini melibatkan pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Untuk naskah, investigasi dilakukan terhadap naskah digital yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dari repositori tepercaya. Untuk artefak, penelitian dilakukan terhadap data arkeologi yang dipublikasikan dalam jurnal dan publikasi penelitian.
2. Sumber Kritik (Verifikasi): Setelah sumber terkumpul, dilakukan kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal untuk mengidentifikasi otentisitas sumber, seperti usia dan asal-usul naskah. Kritik internal digunakan untuk menilai kredibilitas dan kualitas sumber dengan memeriksa konteks penulisan dan kepentingan pengarang.
3. Interpretasi (Penafsiran): Pada tahap ini, data historis yang telah mengalami diverifikasi kemudian dianalisis dan dihubungkan satu sama lain untuk menentukan hubungan pola dan kausal. Prosedur ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang konstruksi identitas politik.
4. 4. Historiografi (Penulisan Sejarah): Langkah terakhir adalah menyajikan temuan dan analisis dalam sebuah sejarah ilmiah dan saintifik yang disajikan dalam bentuk artikel jurnal atau laporan penelitian.

### ***Data dan instrumen penelitian***

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang terdiri dari:

1. Data tekstual dari kutipan-kutipan dalam naskah primer yang berkaitan dengan lembaga silsilah, gelar, upacara, dan keagamaan.
2. Dua. Data visual dari artefak, seperti simbol pada mata uang dan prasasti pada batu nisan. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti manusia, yang berperan sebagai perancang, pengumpul data, analisis, dan alat analisis. Instrumen pendukungnya adalah lembar kajian teks, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tema-tema yang muncul dari teks.

Metode utama pengumpulan data adalah analisis dokumen dan arsip. Teknik ini dilakukan dengan membaca secara saksama

#### ***Metode Pengumpulan Data***

(close reading) dan mencatat (teliti) terkait sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk memperkuat kontekstualisasi dan analisis, data dari studi dokumen kemudian digabungkan dengan penelitian sumber sekunder, seperti buku dan artikel jurnal.

#### ***Teknik Analisis Data***

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi historis (historical content analysis) dan analisis wacana (discourse analysis). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan elemen-elemen spesifik yang menciptakan legitimasi, seperti kemunculan "sultan" atau narasi keturunan Nabi. Sebaliknya, analisis wacana digunakan untuk memahami bagaimana bahasa dan narasi dalam teks digunakan untuk mengkonstruksi realitas sosial-politik dan menghasilkan kekuasaan, berdasarkan kerangka teori yang relevan. Analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sepanjang proses penelitian yang panjang hingga diperoleh hasil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis sumber-sumber awal, studi ini menyoroti tiga strategi utama yang digunakan oleh kesultanan-kesultanan Melayu awal dalam menciptakan identitas politik yang sah dengan menggunakan perangkat-perangkat Islam. Temuan studi ini menunjukkan bahwa konstruksi legitimasi dilakukan melalui integrasi sistematis antara simbol-simbol Islam dan struktur kekuasaan tradisional.

#### ***Konstruksi Silsilah Sakral dan Mitos Asal-Usul :***

Analisis terhadap Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu mengungkapkan bahwa landasan terpenting dalam melegitimasi kekuasaan adalah terciptanya silsilah (nasab) yang menghubungkan raja dengan hukum Islam. "Maka daripada anak cucu Raja Iskandar itu maka adalah datang ke negeri Madekah, maka jadi-lah ia raja di negeri Madekah, dan dari anak cucunya itu maka jadi-lah Nabi Muhammad SAW" (W G Shellabear, 1917) merupakan contoh konstruksi silsilah sangat terstruktur yang terdapat dalam Sejarah Melayu. Iskandar Zulkarnain sebagai simbol hukum universal dan Nabi Muhammad sebagai sumber hikmah spiritual merupakan dua figur legitimasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan Melayu raja silsilah.

1. Hikayat Raja-Raja Pasai Merah Silu Mimpi karya Sultan Malikussaleh bertemu Nabi Muhammad; langsung masuk Islam Mendirikan kesultanan pertama dengan legitimasi profesional
2. Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin) Iskandar Zulkarnain & Nabi Muhammad Silsilah darah hingga Nabi Muhammad Membuat dinasti penguasa Melaka sebagai "darah biru" Islam di seluruh dunia
3. Sultan Iskandar Muda dari Hikayat Aceh Membandingkan kehidupan Iskandar Zulkarnain dan Nabi Yusuf yang menggambarkan sultan sebagai penguasa kosmik yang sudah mapan

Hal ini berkontribusi pada tesis (Tree, 2010) mengenai Islamisasi konsep "keramat", di mana raja kekuatan supranatural tidak hanya berasal dari dunia lokal tetapi juga dari garis keturunan yang terdapat dalam Islam. Strategi ini sangat efektif karena berhasil menggabungkan unsur lokal (konsep raja keramat) dengan unsur Islam global (silsilah nabi), menciptakan bentuk legitimasi hibrida yang dapat diterima oleh berbagai kelompok. Dalam eksplorasi Samudra Pasai, tak perlu disebutkan kegigihan Meurah Seulu, yang diketahui memiliki keterkaitan dengan masyarakat Kesultanan Peureulak. (2022, Nusantara)

#### ***Adopsi Gelar dan Simbol Islamik dalam Wacana Kekuasaan***

Temuan penelitian ini menunjukkan adopsi simbol-simbol Islam dan sistem gelar-gelar yang memperkuat atau melemahkan gelar tradisional. Analisis epigrafi batu nisan Sultan Malik as-Saleh (1297 M) di Samudera Pasai memberikan informasi arkeologi paling awal tentang transformasi ini. "Al-marhum al-mu'azzham al-haq wa al-mu'ayyad al-manshur al-mu'tasim bi-illah al-sultan al-'adil" adalah judul panjang nisan ini (Adrisianti dkk., 2015). Gelar yang sarat dengan terminologi Arab berfungsi sebagai pernyataan politik tentang sifat dan sumber kekuasaannya.

Bukti numismatik dari Kesultanan Malaka semakin penting. Mata uang yang diterbitkan pada masa pemerintahan Sultan Mansur Syah (1459–1477) dikenal sebagai "Sultan al-'Adil", yang merujuk

pada klaimnya sebagai penguasa yang adil sesuai dengan hukum Islam. Penggunaan aksara mata uang Arab-Jawi yang berfungsi sebagai alat transaksi ekonomi sehari-hari merupakan cara yang efektif untuk mendistribusikan legitimasi kepada seluruh masyarakat.

1. Pasai Samudera Sultan Malik as-Saleh Al-Sultan al-Adil Batu nisan Klaim sebagai penguasa Islam yang benar dan dapat diterima
  2. Mata uang dinar Malaka Sultan al-Adil Penegasan otoritas melalui media ekonomi
  3. Darussalam Aceh Stempel kerajaan lagi muaffakat Klaim keadilan dan konteks dalam pemerintahan
- Strategi ini merupakan bentuk konkret dari apa yang dikenal sebagai "pemingkiaan otoritas" (Oman Fathurahman, 2022), di mana simbol-simbol Islam digunakan untuk meningkatkan penggunaan terminologi tertentu. Transisi dari gelar lokal seperti "Seri Teri Buana" menjadi gelar "Sultan" menandakan transformasi identitas politik dari kerajaan lokal menjadi kesultanan, yang merupakan bagian dari Darul Islam.

### ***Pembentukan Institusi Keagamaan sebagai Penopang Struktural***

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa legitimasi tidak hanya dibangun melalui wacana simbolik tetapi juga melalui pembentukan lembaga keagamaan yang berfungsi sebagai kekuasaan struktural sultan. Analisis terhadap Sejarah Melayu dan Undang-Undang Melaka mengungkap jabatan-jabatan penting seperti Qadi (hakim agama) dan Syaikh al-Islam (pemimpin ulama) yang dijunjung tinggi oleh sultan.

Pasal 41.1 dengan jelas menyatakan dalam Undang-Undang Melaka: "Maka titah Sang Raja: 'Hendaklah olehmu perpegang pada hukum Allah...'" (Pasal 41.1 (Kutipan), Undang-Undang Melaka, n.d.). Sebagai penegak syariat, sultan empatan menciptakan hubungan simbiosis yang saling menguntungkan dimana sultan memperoleh legitimasi agama atas kekuasaannya, sedangkan ulama memperoleh dukungan dan ketaatan.

Kajian ini memperkuat teori (Prof. Dr. Azyumardi Azra, 2013) tentang jaringan ulama Nusantara yang tidak hanya berdampak pada politik tetapi juga psikologi. Terbentuknya lembaga seperti Qadi menandakan adanya struktur pemerintahan Islam yang terintegrasi dengan birokrasi kesultanan. Hal ini menjelaskan mengapa kesultanan-kesultanan Melayu mampu bertahan dan berkembang karena berhasil menciptakan sistem legitimasi yang komprehensif, mencakup aspek simbolik dan struktural melalui silsilah dan gelar.

### ***Pembahasan Integratif***

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa konstruksi identitas politik pada masa awal kesultanan Melayu merupakan proses yang kompleks dan multifaset. Strategi yang digunakan tidak akan sepenuhnya mengabaikan adat istiadat tradisional; melainkan, akan menekankan unsur-unsur Islam yang sudah ada. Konsep "daulat", yang sebelumnya didasarkan pada magis-religius pra-Islam, diislamkan melalui nabi keturunan. Gelar kebesaran tradisional digantikan oleh gelar Islam yang bergema di seluruh dunia. Struktur kerajaan istana diperkuat oleh lembaga-lembaga keagamaan yang menghubungkan kerajaan dengan jaringan Islam global.

Proses ini berhasil mengidentifikasi apa yang dikenal sebagai "kesultanan yang sah" (al-sultan al-masyru') dalam teori politik Islam klasik, di mana penguasa yang memerintah didasarkan pada syariat dan dukungan ulama. Hasil model legitimasi hibrida ini menjelaskan bagaimana kesultanan-kesultanan Melayu, seperti Malaka, dapat berkembang menjadi pusat-pusat Islam yang penting di Asia Tenggara. Mereka berhasil menciptakan sistem politik yang secara bersamaan menghormati adat istiadat setempat, persyaratan pemerintah, dan norma-norma Islam. Dibahas.

## **SIMPULAN**

Studi ini menunjukkan bahwa Islam memainkan peran krusial dalam membangun legitimasi identitas politik dan kekuasaan di kerajaan-kerajaan Melayu awal. Legitimasi ini dibangun melalui tiga strategi utama yang saling berkaitan erat. Pertama, penciptaan silsilah suci yang menghubungkan raja dengan tokoh-tokoh suci Islam, seperti Nabi Muhammad dan Iskandar Zulkarnain, berfungsi untuk memperkuat keyakinan agama dan politik masyarakat umum. Kedua, adopsi simbol dan lambang Islam, baik melalui penggunaan simbol "Sultan al-'Adil" maupun aksara Arab-Jawi pada uang dan nisan, merupakan tanda identitas kekuasaan dalam budaya Islam. Ketiga, pembentukan lembaga keagamaan seperti jabatan qadi dan syaikh al-Islam menunjukkan integrasi struktural ilmu politik dan agama dalam pemerintahan.

Ketiga strategi ini mendorong proses Islamisasi untuk berjalan perlahan namun pasti, bukan sebagai penyimpangan dari tradisi politik lokal, melainkan sebagai adaptasi dan penerapan prinsip-prinsip Islam pada struktur kekuasaan yang ada. Dengan demikian, kesultanan Melayu awal dapat menciptakan model hibrida legitimasi kekuasaan dengan menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam universal sehingga dapat diterima secara efektif oleh masyarakat umum.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian dan penulisan artikel ini. Terima kasih kepada para dosen, pembimbing, dan rekan sejawat yang telah memberikan arahan, masukan ilmiah, serta diskusi yang konstruktif selama proses penelitian berlangsung. Penghargaan juga diberikan kepada lembaga perpustakaan, pusat manuskrip, dan arsip yang telah menyediakan akses terhadap naskah-naskah sejarah dan sumber-sumber primer yang menjadi fondasi kajian ini.

Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kajian sejarah politik Islam dan menambah khazanah pemahaman mengenai dinamika kesultanan Melayu awal.

### REFERENSI

- Adrisianti, I., Kurniawan, J., Prihantoro, F., Musadad, Sukamta, Nur, A. J., Sektiadi, Nayati, W., & Abbas, N. (2015). Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia: Khasanah Budaya Bendawi. In Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Arifin, A., & Masykuroh, S. (2023). Diaspora Muslim Pasai di Pantai Utara Jawa Abad ke-14. *Jawi*, 6(1), 61–72. <https://doi.org/10.24042/jw.v6i1.16405>
- Azra, A. (2013). The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia. Pustaka Nasional. [https://library.um.ac.id/images/stories/the origins of islamic reformism in southeast asia.pdf](https://library.um.ac.id/images/stories/the%20origins%20of%20islamic%20reformism%20in%20southeast%20asia.pdf)
- Buyong Adil, H. (1981). Sejarah Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. <https://ia600208.us.archive.org/7/items/sejarahmelayu01unkngoog/sejarahmelayu01unkngoog.pdf>
- El, Y., Azwanda, H., Yusuf, S., & Roza, E. (2024). Edu Global : Jurnal Pendidikan Islam Proses Masuk dan Penyebarluasan Islam pada Masa Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. 5(2), 1–6.
- Fathil, F., Fathil, F., & Mohd Amin, J. (2023). Sistem Kewangan Islam Di Malaysia Dari Era Kesultanan Melayu Melaka Hingga Kurun Ke-21: Satu Tinjauan. *Journal Islamic Philanthropy and Social Finance*, 5(2), 125–136. [https://doi.org/10.24191/jipsf/v5n22023\\_125-136](https://doi.org/10.24191/jipsf/v5n22023_125-136)
- Gallop, A. T. (2019). Malay Seals and Signet Rings. SOAS University of London. [https://eprints.soas.ac.uk/31984/1/Gallop\\_2019\\_Seals.pdf](https://eprints.soas.ac.uk/31984/1/Gallop_2019_Seals.pdf)
- Hamid, A. R. (2025). Jaringan Maritim dan Islamisasi Demak abad XV–XVI. *Jawi*, 8(1), 11–26. <https://doi.org/10.24042/00202582766700>
- Hooker, M. B. (1986). Islamic Law in Southeast Asia. Oxford University Press. <https://archive.org/details/IslamicLawInSouthEastAsia>
- Muhammad, A. (2021). Islam dan Budaya Politik Melayu. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 17 nomor 2, 157–172.
- Nusantara, I. (2022). Samudra Pasai. 12(1), 35–60.
- Oman Fathurahman. (2022). Filologi Indonesia Teori dan Metode Edisi Revisi. [https://www.google.co.id/books/edition/Filologi\\_Indonesia/YRm6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Filologi_Indonesia/YRm6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Prof. Dr. Azyumardi Azra, M. . (2013). Jaringan Ulama Timur Tengah. [https://www.google.co.id/books/edition/Jaringan\\_Ulama\\_Timur\\_Tengah/E5sCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Jaringan_Ulama_Timur_Tengah/E5sCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Tree, S. (2010). Leaves of the Same Tree Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka. 177–180.
- Undang-Undang Melaka - Pasal 41.1 (Kutipan). (n.d.). 1, 41.
- W G Shellabear. (1917). Hikayat Sri Rama. <https://archive.org/details/biostor-176311/page/n7/mode/2up>